



Pengembangkan Literasi Digital pada Warga Negara Muda dalam Pembelajaran PPKn melalui Model VCT

Benaziria*

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

Abstrak

Delapan puluh persen dari 30 juta anak dan remaja Indonesia menggunakan internet dan media digital. Pola perilaku anak dan remaja dalam menggunakan internet cenderung memberikan informasi pribadi mereka pada media digital, sejumlah besar anak dan remaja di Indonesia terekspos konten pornografi, secara sengaja, ataupun tidak sengaja, minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital yang dilakukan oleh anak juga mendorong terjadi "penyimpangan" penggunaan internet, perilaku perundungan (bully), dan mudahnya mengeluarkan kata-kata makian pada laman media sosial di internet, menunjukkan telah terjadi degradasi moral terhadap anak dan remaja, penggunaan media digital dan internet juga mendorong timbulnya kejahatan cyber. PPKn merupakan mata pelajaran yang diamanahkan membentuk dan mengembangkan karakter warganegara berdasarkan nilai-nilai pancasila, termasuk juga karakter "melek" digital (literasi digital) kepada peserta didik. Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru PPKn untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi digital kepada peserta didik, sehingga terbentuk etika digital dalam penggunaan media digital dan internet. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Simpulannya Guru PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk dan mengembangkan literasi digital pada peserta didik sebagai warga negara muda. Melalui model pembelajaran VCT (value clarification tehnik) guru PPKn dapat mengembangkan budaya literasi digital kepada peserta didik secara efektif.

Kata Kunci: Kewarganegaraan digital, Literasi digital, PPKn, VCT.

Abstract

Eighty percent of Indonesia's 30 million children and adolescents use the internet and digital media. Patterns of behavior of children and adolescents in using the internet tend to provide their personal information on digital media, a large number of children and adolescents in Indonesia exposed pornographic content, intentionally, or unintentionally, the lack of parental supervision of digital activities conducted by children also encourage the "irregularities" of internet use, bullying, and the ease of removing insulting words on social media pages on the internet, indicating that there has been moral degradation of children and adolescents, the use of digital media and the internet has also encouraged cyber crime. PPKn is a subject that is mandated to develop and develop citizenship character based on Pancasila values, as well as digital literacy characters (lectures) to learners. The purpose of writing this article is to provide an alternative model of learning that can be applied by teachers PPKn to grow and develop a digital literacy culture to learners, so that digital ethics is formed in the use of digital media and internet. Writing this article using literature study method. Conclusion PPKn teachers have a strategic role in shaping and developing digital literacy in peserta students as young citizens. Through the VCT learning model (value clarification tehnik) PPKn teachers can develop the digital literacy culture to learners effectively.

Keywords: Digital Citizenship, Digital Literacy, PPKn, VCT.

How to Cite: Benazaria. (2018). Pengembangkan Literasi Digital pada Warga Negara Muda dalam Pembelajaran PPKn melalui Model VCT, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 11-20.

*Corresponding author:
E-mail: sibenachoiri@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini literasi digital sangat penting untuk diterapkan kepada peserta didik. Maraknya penggunaan internet dan media digital di kalangan anak dan remaja, serta mudahnya akses internet yang dapat dilakukan melalui *handphone* menimbulkan dampak negatif pada kalangan anak dan remaja di Indonesia. Anak dan remaja Indonesia melakukan akses internet dan menggunakan media digital dengan pengawasan orang tua yang minim, sehingga minimnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital oleh anak akan menimbulkan dampak negatif yang mengarah pada perilaku negatif, karena tidak semua informasi yang tersebar pada media digital dan internet layak untuk dikonsumsi oleh anak dan remaja Indonesia. Anak dan remaja Indonesia rawan sekali terpapar dengan konten-konten negatif, seperti porno aksi dan pornografi yang tersebar pada internet. Tidak hanya itu saja timbul perilaku mencaci dan memaki pada anak dan remaja Indonesia yang dilakukan melalui media sosial. Anak dan remaja Indonesia cenderung mencontoh apa yang mereka lihat pada media digital dan informasi yang mereka peroleh melalui internet.

Berdasarkan data Kominfo kurang lebih ada 30 juta anak dan remaja Indonesia aktif dalam menggunakan internet dan media digital sebagai alat komunikasi. Rata-rata media yang mereka gunakan untuk mengakses internet adalah personal komputer, laptop, dan *smartphone*.

Motivasi anak dan remaja Indonesia menggunakan internet karena didorong oleh tiga hal, pertama sebagai media hiburan, kedua sebagai media komunikasi dengan teman, dan ketiga mencari informasi yang berkaitan dengan tugas sekolah. Penelitian Kominfo terhadap anak dan remaja Indonesia yang berumur 9-19 tahun di seluruh Indonesia mengemukakan bahwa penggunaan media sosial dan media digital pada anak dan remaja Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari anak-anak dan remaja Indonesia. Hasil studi kominfo menyatakan 98% anak-anak dan remaja Indonesia tahu tentang internet dan sebanyak 79,5 % anak dan remaja Indonesia adalah pengguna internet. Selain itu penelitian kominfo juga menyatakan bahwa rata-rata anak dan remaja Indonesia memberikan informasi pribadi yang berkaitan

dengan alamat rumah, alamat sekolah, no telp, pada media digital dan internet yang mereka gunakan.

Data selanjutnya orang tua di Indonesia merupakan imigran dalam dunia digital, data kominfo menginformasikan bahwa orang tua sedikit ketinggalan dalam menggunakan dan menguasai media digital, sehingga pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital dan akses internet yang dilakukan oleh anak dan remaja cenderung minim. Minimnya pengawasan orang tua terhadap akses internet yang dilakukan oleh anak dan remaja menyebabkan anak secara langsung dan tidak langsung terpapar konten-konten negatif seperti pornografi dan pornoaksi yang sengaja diakses, maupun tidak sengaja diakses yang muncul dalam bentuk iklan.

Berdasarkan hasil riset Kominfo tersebut penggunaan media digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari anak dan remaja Indonesia. Penggunaan media digital dan akses internet yang dilakukan oleh anak dan remaja Indonesia yang disertai oleh minimnya pengawasan orang tua akan menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku remaja. Timbulnya kenakalan-kenalan remaja akibat informasi yang diperoleh melalui media digital dan internet yang tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja akan mendorong munculnya perilaku menyimpang pada anak dan remaja seperti tindakan perundungan (*bullying*), budaya mencaci dan memaki yang sering dilakukan melalui media internet khususnya media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, dll, perilaku kekerasan yang sengaja disebarkan melalui media sosial internet. Perilaku sex bebas akibat membuka konten negatif tanpa pengawasan orang tua, tindakan *plagiat* terhadap hasil karya seseorang.

Perilaku-perilaku negatif akibat penggunaan media digital dan internet tersebut perlu segera diwaspadai dan ditindaklanjuti dengan segera. Lemahnya pengawasan orang tua yang disebabkan orang tua yang minim dalam menguasai teknologi digital, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan media digital dan internet salah satunya adalah melalui mata pelajaran PPKn di sekolah. Melalui mata pelajaran PPKn guru dapat menumbuhkan dan mengembang literasi digital pada peserta didik. Literasi digital ini meliputi meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan, serta menumbuhkan kesadaran akan penggunaan media digital dan internet. Sehingga muncul etika digital dalam penggunaan media digital dan internet.

PPKn mata pelajaran yang berperan menumbuhkan etika digital pada peserta didik sebagai warganegara muda yang meliputi pemahaman peserta didik tentang penggunaan media digital secara positif dan bertanggung jawab, dan bagaimana cara berkomunikasi secara daring dengan aman. PPKn dapat efektif digunakan sebagai media untuk menumbuhkan dan mengembangkan literasi digital pada peserta didik, jika guru menggunakan dan menerapkan model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran PPKn di sekolah. Ketika terjadi fenomena lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital dan internet yang dilakukan oleh anak dan remaja, maka lembaga pendidikan melalui guru harus segera mengatasi kelemahan tersebut, dengan cara menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan “melek” literasi digital kepada peserta didik dan mata pelajaran yang tepat digunakan dalam menumbuhkan karakter kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) tersebut adalah melalui PPKn.

PEMBAHASAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan kewarganegaraan (*civic atau citizenship education*) di Indonesia dikenal dengan istilah PPKn. Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan di beberapa negara di dunia memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan PKn dalam sistem pendidikan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia dapat melalui pembelajarn *crosscurricular* yaitu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sejarah, ilmu sosial (*social studies*) atau sebagai subjek mata pelajaran yang terpisah atau *saparate* (ICCS, 2013: 20). Dalam sistem pendidikan Indonesia, PPKn merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri (*saparate*), sedangkan di beberapa negara eropa dan amerika utara PKn terintegrasi dengan mata pelajaran IPS atau dikenal dengan sebutan *social studies*, sedangkan beberapa negara lainnya seperti Austria penerapan PKn dilakukan melalui

cross curricular, yaitu PKn diajarkan melalui semua mata pelajaran. Dalam sistem pendidikan di Hongkong pendekatan PKn menggunakan istilah pendidikan moral.

Cogan (1998) mengemukakan pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang menyiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki identitas kebangsaan dan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warganegara dalam konteks berbangsa dan bernegara. Budimasyah (2010) juga mengemukakan PPKn di Indonesia dalam prakteknya dipahami sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. PPKn memiliki misi untuk mendidik warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Senada pendapat yang telah diuraikan selumnya,

Winaputra (2016) mengemukakan PPKn merupakan wahana pendidikan karakter yang memiliki visi dan misi yang utuh, yaitu mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*), kepercayaan diri atau keteguhan kewarga negara (*civic confidence*) dan komitmen warganegara (*civic committment*). Secara konseptual dan ditinjau dari aspek psikologis, pedagogis, dan sosial-kultural. PPKn berujuan untuk membentuk dan mewujudkan warga negara muda (peserta didik) untuk memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kaidah UUD 1945, dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Winaputra (2016) secara idiil dan secara konsep instrumental, PPKn secara utuh memiliki vis dan misi yang mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila dengan keseluruhan tuntutan psikopedagogis dan sosial-kultural warga negara dalam konteks pembudayaan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Zandonella (ICCS, 2013) mengemukakan PKn merupakan prasyarat untuk mengembangkan

individu dan masyarakat keseluruhan dalam menghadapi kompleksitas dalam bidang kehidupan PKN secara proaktif berkontribusi dalam menghadapi dan menumbuhkan kesadaran berdemokrasi. PKN (*civic and citizenship education*) bertujuan mengajarkan nilai-nilai umum kemanusiaan, solidaritas, toleransi, kedamaian, keadilan, dan kesadaran akan lingkungan alam.

Groof dan Franck (ICCS, 2013) mengemukakan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk setiap anak muda menjadi orang yang berpikir dan bertindak secara demokratis. Pendidikan untuk kewarganegaraan akibatnya berfokus pada memperlengkapi orang muda dengan sejumlah keterampilan dasar yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam cara yang konstruktif dan kritis dalam kehidupan sosial.

Menurut Branson (1998) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki hubungan dengan perkembangan dan penguatan karakter peserta didik. Pengembangan karakter peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan dapat berjalan efektif jika institusi pendidikan menerapkan program pendidikan kewarganegaraan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan karakter-karakter publik dan pribadi yang diinginkan. Kegiatan pembelajaran seperti ini cenderung mendorong tumbuhnya karakter yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif. Maka untuk mengembangkan peserta didik guru PKN memerlukan strategi yang tepat. Strategi pembelajaran yang dipilih dan digunakan harus berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia, dkk (2013) mengemukakan mata pelajaran PPKn secara signifikan dapat mempengaruhi pengembangan karakter peserta didik. Pembelajaran PPKn yang dilakukan secara tidak baik, mempengaruhi peserta didik dalam menerapkan karakter-karakter baik. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa cara guru menyajikan PPKn dalam proses pembelajaran di kelas mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Nugroho (2015) diperoleh hasil bahwa kinerja guru dan iklim belajar berpengaruh dan berdampak positif

terhadap karakter peserta didik. Kedua faktor inilah yang menjadi penentu pembentukan karakter peserta didik selama berada di sekolah. Kinerja guru PPKn menjadi contoh nyata mengenai siapa yang dapat dijadikan model oleh para peserta didik. Kedua hal ini digabungkan akan membentuk karakter positif pada peserta didik.

Senada dengan hasil penelitian tersebut, Bischoff (2016) juga mengemukakan bahwa sekolah berfungsi sebagai tempat peserta didik untuk melatih peserta didik dalam berpartisipasi, sehingga dimasa depan akan terwujud warganegara yang partisipatifmasa dan sekolah juga berperan sebagai tempat untuk tindakan konsekuensial. Berdasarkan beberapa teori dan hasil penelitian PKN atau dalam kurikulum pendidikan Indonesia disebut dengan PPKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakter pada warganegara, serta mewujudkan warganegara yang partisipatif dan berpikir kritis oleh sebab itu penyajian mata pelajaran PPKn disekolah memiliki pengaruh pada pembentukan karakter peserta didik, sehingga guru yang mengampu mata pelajaran PPKn harus memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, yaitu strategi pembelajaran yang salah satunya didasari oleh tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Salah satu karakter yang harus dikembangkan guru PPKn pada adalah peserta didik saat ini adalah literasi digital untuk membentuk kewarganegaraan digital (*digital citizenship*). Kewarganegaraan digital merupakan karakter warganegara yang melek akan literasi digital, yaitu bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital dan internet. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan literasi digital pada peserta didik, maka guru PPKn harus memilih dan menggunakan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran PPKn.

Lestari (2016) mengemukakan implementasi pembentukan karakter kewarganegaraan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, pembentukan karakter kewarganegaraan melalui pengajaran langsung (*direct teaching*). Kedua, pembentukan karakter kewarganegaraan melalui pengajaran tidak langsung (*indirect teaching*).

Pengembangkan Literasi Digital (*Digital Literacy*) untuk Mewujudkan Kewarganegaraan Digital

a. Literasi Digital (*Digital Literacy*)

Sekarang ini keahlian *melek* digital (*digital literacy*) adalah salah satu keterampilan penting bagi siswa. Berdasarkan beberapa riset terhadap penggunaan media digital dan internet pada anak dan remaja Indonesia, cenderung memberikan efek negatif pada perilaku anak dan remaja, karena minimnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital dan internet memicu timbulnya perilaku yang mengarah pada degradasi moral anak dan remaja Indonesia. Tidak semua informasi pada media digital dan internet layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Oleh karena guru, terutama guru PPKn memiliki peran dalam mengembangkan literasi digital pada peserta didik.

Konsep dan istilah literasi digital yang sekarang umum digunakan, diperkenalkan oleh Paul Gilster. Gilster mengemukakan keaksaraan digital atau literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dengan penekanan pada pemikiran kritis bukan saja hanya keterampilan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Literasi digital perlu dikembangkan pada peserta didik guna menghadapi tantangan abad dua satu.

Calvani, dan Cartelli mengemukakan literasi digital merupakan keterampilan, pengetahuan dan etika dalam menggunakan media digital dan internet. Martin menggambarkan seseorang yang paham literasi digital adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis dan mensintesis sumber daya digital. Martin (2008) menyimpulkan bahwa literasi digital dapat dipahami pada tiga aspek, yaitu kompetensi digital, penggunaan digital dan transformasi digital (Chan,dkk, 2017: 2).

Konsep literasi digital merupakan rentang yang sangat luas, mulai dari keterampilan dan kompetensi yang spesifik hingga kesadaran dan perspektif yang agak umum. Perkembangan internet dan tumbuhnya mesin pencari google, serta jejaring sosial telah mendorong bentuk literasi yang dibutuhkan untuk saat ini, yaitu literasi digital. (Bawden, 2001:219). Revolusi digital telah mengubah perilaku pencarian

informasi yang tidak dapat dikenali dan dengan mudah digunakan yaitu melalui web dan mesin telusur yang memberi semua informasi secara muda, sehingga kita dapat dengan mudah menemukan, membuat dan menggunakan informasi dari internet. Literasi digital adalah kemampuan dan kompetensi yang menunjukkan, menemukan, mengevaluasi, dan menerima atau menolak informasi pada penggunaan media digital dan internet (Fieldhouse dan Nicholas, 2008: 49).

Alkalai (2004) mengemukakan literasi digital bukan hanya sebatas kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak atau mengoperasikan perangkat digital saja, melainkan literasi digital adalah mencakup berbagai macam keterampilan kognitif, motor, sosiologis, dan emosional yang kompleks, yang dibutuhkan pengguna agar dapat berfungsi secara efektif pada lingkungan digital. Konteks ini meliputi membangun pengetahuan dari navigasi nonlinier, *hypertextual*; mengevaluasi kualitas dan keabsahan informasi; dan memiliki pemahaman matang dan realistis tentang peraturan yang berlaku di dunia maya.

Etika digital sebagai bagian dari literasi digital harus ditanamkan kepada peserta didik, peserta didik harus memiliki etika dan memiliki karakter tanggung jawab dalam komunitas *online* guna menghindari kegiatan yang berdampak negatif baik bagi masyarakat tradisional maupun online (seperti pembajakan). Para guru dapat memberikan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi mengenai bagaimana mengungkapkan gagasan dan opini secara *online*, mengevaluasi informasi, dan membuat konten *online*. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan penulis menyimpulkan literasi digital berkaitan dengan etika digital, literasi digital merupakan kompetensi yang dimiliki seseorang dalam menggunakan media digital dan internet. Literasi digital adalah etika seseorang yang dilandasi oleh norma-norma yang ada dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab, kemampuan menyaring, memilah informasi, dan cenderung mengakses konten positif dalam penggunaan media digital dan internet.

b. Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*)

Sehubungan dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang sangat pesat,

dan berpotensi untuk disalahgunakan, seperti menyebarkan berita-berita *hoax*, membuat konten negatif, dan kejahatan *cyber* lainnya, maka diperlukan kebijakan untuk mengelola, mengembangkan dan mengendalikan perilaku warganegara dalam menggunakan media digital dan internet. Kebijakan tersebut berupa membentuk kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) kebijakan kewarganegaraan digital dengan pendekatan melek digital atau literasi digital. Kebijakan ini harus disusun secara komprehensif dengan menggunakan dan memanfaatkan peran penting lembaga pendidikan. Pendidikan berperan dalam mempersiapkan warga digital. Pembentukan kewarganegaraan digital dapat dilakukan melalui PPKn.

Choi (2016) mengemukakan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) sebagai etika. Kewarganegaraan digital sebagai etika mengacu pada bagaimana menggunakan internet dengan tepat, aman, etis, dan bertanggung jawab dalam kegiatan dunia internet. Kewarganegaraan digital menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan mengevaluasi informasi dan berkomunikasi dengan orang lain secara online seperti bagaimana menilai informasi, membaca dan menulis secara kritis pada media *online*, dan mengekspresikan diri mereka secara *online*. Kewarganegaraan digital menyoroti fakta bahwa perilaku online yang bertanggung jawab dan aman harus menjadi topik serius dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dan Internet yang aman, bertanggung jawab, dan etis; kesadaran digital; dan tanggung jawab dan hak digital merupakan kriteria kewarganegaraan digital.

Kewarganegaraan digital menurut Ribble (Alberta, 2012) meliputi: *pertama*, warga negara yang memiliki akses digital (partisipasi elektronik penuh), *kedua*, komunikasi digital, *ketiga*, literasi digital, yaitu proses belajar mengajar tentang teknologi dan penggunaan teknologi, *keempat* etika digital, yaitu standar perilaku dalam menggunakan media digital dan internet), *kelima*, *digital Law*, yaitu tanggung jawab atas tindakan dan perbuatan menggunakan elektronika, *keenam*, keamanan digital, yaitu tindakan pencegahan elektronik untuk melindungi peserta didik, kelompok masyarakat, organisasi dan warganegara), *ketujuh*, *digital health and wellness*, yaitu kesehatan fisik dan

psikologis di dunia digital, *kedelapan*, hak dan tanggung jawab digital. Sifat kewarganegaraan sebagai dasar untuk mengembangkan kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan didefinisikan sebagai keadaan menjadi warga masyarakat suatu komunitas sosial, politik atau nasional tertentu. Sementara kewarganegaraan membawa hak dan tanggung jawab, mendefinisikan hak-hak dan tanggung jawab tersebut bervariasi sepanjang waktu dan di komunitas tertentu.

Kewarganegaraan membutuhkan prinsip moral yang tinggi, sama halnya dengan kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital membutuhkan prinsip moral untuk bekerja secara efektif dalam masyarakat global yang berjejaring, berdasar waktu dan wilayah geografis yang multi-budaya. Kewarganegaraan mensyaratkan keseimbangan pemberdayaan dan tanggung jawab pribadi dengan kesejahteraan masyarakat. Kebaikan individu dan kebaikan masyarakat harus berada dalam keadaan seimbang. Tantangan dalam komunitas digital adalah memastikan keseimbangan yang efektif. Komunitas digital membutuhkan partisipasi dan peran masyarakat untuk mempersiapkan kaum muda (warga negara muda) untuk berpartisipasi dalam komunitas ini dengan cara yang berarti, bertanggung jawab dan peduli. Untuk mewujudkan kewarganegaraan digital, maka lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam mewujudkan hal tersebut, lembaga pendidikan terutama guru, memiliki peran strategi dalam menumbuhkan dan mengembangkan literasi digital peserta didik sebagai warga negara muda agar bijak dan kritis dalam menggunakan media digital dan internet (Alberta, 2012).

ISTE (2007) mengemukakan karakter kewarganegaraan digital merupakan salah satu standar penting yang harus guru tanamkan dan kembangkan kepada peserta didik. Konsep kewarganegaraan digital juga perlu ditambahkan ke dalam kurikulum pendidikan, seperti dimasukkan menjadi salah satu bagian studi sosial untuk mempromosikan kewarganegaraan digital yang aktif. Karakter kewarganegaraan digital, dapat memasukkan isu kewarganegaraan digital ke dalam tema yang relevan, seperti kedalam mata pelajaran "Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Masyarakat", dan "Cita-Cita dan Praktik Kewarganegaraan"

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan, menurut penulis kewarganegaraan digital dalam ruang lingkup Indonesia sebagai negara multikultural kewarganegaraan digital perlu diwujudkan. Kewarganegaraan digital memiliki ciri masyarakat yang melek digital atau memiliki kecakapan literasi digital. Penanaman dan pengembangan karakter literasi digital sangat penting untuk dilakukan oleh lembaga pendidikan. Literasi digital dapat mencegah tindakan-tindakan menyimpang, seperti *cyber crime*, membuka situs porno, menjanging berita-berita *hoax* yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, cacia-maki di dunia maya, dll. Salah satu ciri dari kewarganegaraan digital adalah literasi digital (melek digital), keadaan dimana warganegara tidak hanya menguasai penggunaan media digital dan internet saja, melainkan memiliki etika digital, berpikir kritis, bertanggung jawab, mengetahui dan taat pada norma-norma yang berlaku. Maka dari itu lembaga pendidikan, melalui guru, terutama guru PPKn memiliki peran penting dalam meumbuhkan dan mengembangk literasi digital, sehingga kewarganegaraan digital dapat terwujud.

Strategi Guru PPKn dalam Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara Muda Melalui Model Pembelajaran VCT

Guru, terutama guru PPKn memiliki posisi dan peran strategi dalam mewujudkan kewarganegaraan digital. Guru PPKn dapat mendidik peserta didik untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab, berpengetahuan luas, dan aktif di tingkat lokal, nasional, dan global. Berdasarkan riset Kementerian Komunikasi dan Informatika (Imawan, 2014, 79-82) menunjukkan hasil penetrasi media di Indonesia ditempati oleh ponsel sebagai posisi tertinggi, yakni 104%), lalu diikuti oleh televisi (95%), *smartphone* (67%), radio (47%), surat kabar (25%), internet (24%), dan majalah (13%). Serta 415 surat kabar harian, 495 majalah, dan 257 tabloid. Riset terkini mungkin internet, karena adanya koneksi internet yang lebih baik memungkinkan penyebaran informasi. Penggunaan internet secara dominan dikonsumsi oleh kelas menengah (Lakstian, 2016: 112). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan fenomena perkembangan media digital dan internet yang pesat harus diiringi dengan peningkatan kesadaran kita untuk

mendefinisikan kembali cara mentransfer, mengelolah dan menerima informasi pada media digital dan internet. Literasi digital perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam penggunaan media digital dan internet.

Tilaar (1998) mengemukakan dalam kurikulum pendidikan nasional, Pendidikan Nilai cenderung menjadi suatu kegiatan formal. Pendidikan nilai dirangkum ke dalam bentuk-bentuk pelajaran formal baik itu merupakan pelajaran pancasila, mata pelajaran, PMP, mata pelajaran sejarah nasional serta berbagai penataran dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan pancasila. Menurut Kerr (1999) *Citizenship* atau *civic education* secara luas ditafsirkan proses pendidikan yang dilakukan melalui sekolah, pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan orang muda untuk berperan, berpartisipasi dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, Guru PPKn berperan penting dalam menanamkan dan menumbuhkan kecakapan literasi digital kepada peserta didik melalui mata pelajaran PPKn. Kecakapan literasi digital dapat disisipkan oleh guru PPKn pada semua KD (Kompetensi Dasar) mata pelajaran PPKn, terutama untuk kelas menengah, yaitu SMP dan SMA. PPKn sebagai mata pelajaran yang bermuatan nilai dan bertujuan membentuk warganegara yang berkarakter, maka guru PPKn harus memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, agar penginternalisasian kecakapan literasi digital peserta didik dapat maksimal dan optimal dilakukan, sehingga kewarganegaraan digital dapat terwujud. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru PPKn dalam mengintegrasikan kecakapan literasi digital pada peserta didik adalah menerapkan model pembelajaran *Value Clarification Tehnique* atau teknik klarifikasi nilai.

Djahiri (1985) mengemukakan VCT sangat efektif diterapkan untuk menginternalisasikan nilai kepada peserta didik. Kelebihan yang dimiliki oleh VCT adalah : 1) VCT Mampu menanamkan dan mengembangkan nilai moral kepada siswa, 2) VCT Memungkinkan siswa untuk mengklarifikasi dan menggali lebih banyak informasi dari bahan pembelajaran, sehingga guru dapat menjelaskan secara lebih rinci mengenai nilai moral, 3) gur yang menerapkan model pembelajaran dapat

mengklarifikasi dan mengevaluasi kualitas nilai moral peserta didik, 4) *VCT* mendorong, melibatkan dan membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensi, terutama yang berkaitan dengan perilaku potensial peserta didik, 5) memungkinkan guru dan peserta didik untuk mengambil pelajaran dari kehidupan seseorang, 6) memungkinkan guru dan peserta didik untuk menghindari, meniadakan intervensi nilai-nilai yang tidak dibutuhkan, dan menggabungkan berbagai nilai moral ke dalam sistem nilai dan menjadi seseorang yang berkarakter, 7) memberi gambaran tentang nilai moral yang seharusnya diterima.

Nuryanta dan Suyato (2016) mengemukakan penerapan model pembelajaran *VCT* dalam PPKn dapat meningkatkan karakter kewarganegaraan siswa. *VCT* membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Peserta didik memperoleh kejelasan/kemantapan nilai. Peserta didik menemukan nilai-nilai dapat memilih nilai yang dianggap baik untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan. Ramadani (2017: 64) juga mengemukakan penerapan model pembelajaran *VCT* dapat meningkatkan solidaritas sosial. Hasil belajar peserta didik yang menerapkan model pembelajaran *VCT* ketika proses pembelajaran dikelas memiliki tingkat pengetahuan dan sikap materialisme Nasionalisme dan Patriotisme yang lebih baik daripada kelas yang tidak menerapkan *VCT*. *VCT* dapat digunakan secara efektif untuk memperbaiki sikap Nasionalisme dan Patriotisme peserta didik.

Senada dengan penelitian sebelumnya, Dahliar (2017) mengemukakan penerapan model pembelajaran *VCT* dalam proses pembelajaran dikelas dapat menumbuhkan dan meningkatkan karakter tanggung jawab peserta didik. Selain itu, penerapan model pembelajaran *VCT* meningkatkan kepedulian sosial peserta didik. Peserta didik menjadi lebih mengerti tentang materi sosial dan nilai sosial dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Model pembelajaran *VCT*, peserta didik menanamkan nilai kepedulian sosial melalui cara yang logis yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, sehingga menumbuhkan kepekaan sosial. Penerapan model pembelajaran *VCT* mampu

menumbuhkan, mengembangkan dan memperbaiki karakter peserta didik (Khairunisa, 2017)

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai *VCT*, maka penulis menyimpulkan model pembelajaran *VCT* sangat cocok dan tepat digunakan dan diterapkan oleh guru PPKn untuk menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan kecakapan literasi digital pada peserta didik sebagai warga negara muda. Guru dapat menggunakan beberapa teknik yang terdapat dalam model pembelajaran *VCT*, model pembelajaran, memiliki beberapa teknik yang dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Djahiri (1985) mengemukakan teknik model pembelajaran *VCT*, meliputi : *pertama*, metode percontohan, *kedua* *VCT* menggunakan analisis nilai, yaitu reportase/liputan, analisis secara akurat, analisis tulisan dan cerita tidak selesai, *ketiga* *VCT* menggunakan daftar/matrix meliputi, yaitu daftar baik - buruk, daftar tingkat urutan, daftar skala prioritas, daftar gejala kontinum (terus menurun), daftar penilaian diri sendiri, dan daftar membaca perkiraan orang lain tentang diri kita, *keempat* *VCT* menggunakan kartu keyakinan, diantaranya *VCT* menggunakan wawancara *VCT* menggunakan yurisprudensi, dan *VCT* menggunakan teknik inkuiri nilai.

SIMPULAN

Degradasi moral akibat penyalagunaan media digital pada peserta didik khususnya anak dan remaja merupakan permasalahan yang harus segera diatasi. Berdasarkan beberapa kajian terori dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa teknik klarifikasi nilai terbukti dapat menumbuhkan, dan meningkatkan karakter kewarganegaraan peserta didik. Oleh karena itu, guru PPKn disarankan untuk menggunakan dan menerapkan teknik klarifikasi nilai sebagai alternatif penggunaan metode pembelajaran dalam pembentukan karakter atau kecakapan literasi digital peserta didik. Literasi digital berkaitan dengan etika digital dalam menggunakan media digital dan internet, meliputi bagaimana menggunakan media digital dan internet dengan tepat, aman, etis, dan bertanggung jawab, serta menilai informasi, membaca dan menulis secara kritis pada media *online*. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran

penting dalam membentuk karakter peserta didik, dan guru memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter pesertad didik, maka dari itu seorang guru dituntut untuk selalu mengembangkann dan berinovasi dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu orang tua harus berperan secara aktif dalam mengawasi tumbuh kembang anaknya, jangan hanya menyerahkan pada sekolah saja, orang tua jangan terlalu permisif terhadap penggunaan *gadget* oleh anak- dan remaja. Orang tua harus *melek* digital, dan tidak boleh abai terhadap aktivitas anak terhadap media digital. Penulis menyarankan untuk meningkatkan kompetensi profesionalitas guru, maka lembaga berwenang terutama kementerian pendidikan harus mengadakan *workshop* kepada para guru, agar guru dapat paham mengenai media digital dan internet, dan untuk para orang tua diadakan penyuluhan-penyuluhan melalui lembaga berwenang mengenai mengenai pentingnya literasi digital supaya orang tua, dapat melek digital dan dapat mengawasi penggunaan media digital pada anak. Sehingga prilaku menyimpang akibat menggunakan media digital yang salah dapat diminimalisirkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada rekan seperjuangan Prodi PPKn PPS UNY dan Rekan seperjuangan Emy Ramdhani untuk bantuannya, sehingga artikel ini dapat terwujud. Terima kasih untuk semua Dosen PPKn PPS UNY atas bimbingan dan ilmunya

DAFTAR PUSTAKA

Alkalai & Eshet,Y. (2004). Digital literacy: a conceptual framework for survival skills in the digital era. *Jl. of Educational Multimedia and Hypermedia* 13(1), 93-106

Ambarita, T., (2017), Penerapan Model Pembelajaran Inside-Outside Circle Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 3 (1): 43-47

Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. *Journal of Documentation*, 57(2), 218-259

Biro Humas Kominfo. (2017). Kominfo Dorong Anak-anak Remaja gunakan internet untuk membantu pendidikan, https://kominfo.go.id/content/detail/3835/kominfo-dorong-anak-anak-remaja-gunakan-internet-untuk-membantu-pendidikan/0/berita_satker. (diakses 27 Desember 2017)

Biro Humas Kominfo. (2017). Riset Kominfo dan UNICEF mengenai perilaku anak dan remaja dalam menggunakan internet, https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers. (diakses 27 Desember 2017)

Bischoff, K. (2016). The civic effects of schools: Theory and empirics. *Theory and Research in Education*. 14, 91-106.

Branson, S.M. (1998). *The role of civic education*. Amerika: Center for Civic Education.

Budimansyah, D. (2010). Tantangan globalisasi terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 11, 8-16.

Chan, K.S.B. Churchill,D. & Chiu, F.K.T. (2017). Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach. *Journal of International Education Research*, 13, 1-16.

Choi, M, (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *theory & research in social education*, 00, 1-43.

Cogan, J.J. (1998). *Citizenship for the 21st century: an international perspective on education*. London: Kogan Page.

Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahliar. (2017). the implementation of vct (value clarification technique) Modelin improving students' responsibility character on environmentin Indonesia (a case study in state senior high schools in solok regency), *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*,1, 293-297.

Dewabroto, S.G. (2017). 98 Persen Anak dan Remaja Tahu Internet, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3836/98+Persen+Anak+dan+Remaja+Tahu+Internet/0/berita_satker. (diakses 27 Desember 2017)

Djahiri, A. K. (1985). *Strategi pengajaran afektif-nilai-moral vct dan games dalam vct*. Bandung: FPIPS

Djiwandono, I.P. (2015). *Meneliti itu tidak sulit: Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.

Education. A. (2012). *Digital Citizenship Policy Development Guide*. Kanada: Alberta Education School Technology Branch.

Faizah, (2017), *Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual dalam Mata Pelajaran PKn*, *Anthropos:*

- Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 3 (1): 55-60.
- Fieldhouse, M. & Nicholas, D. (2008). Digital Literacy as Information Savvy: The Road to Information Literacy.
- International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). (2013). ICCS, 2009 Encyclopedia approaches to civic and citizenship education around the world. Netherland: Multicopy.
- International Society for Technology in Education (ISTE). (2007). standards for teachers. Retrieved from http://www.iste.org/docs/pdfs/2014_ISTE_Standards-T_PDF.pdf
- Kerr, D. (1999). Citizenship education in the curriculum: an international review. *The School Field* Vol. 10. No. ¾.
- Khairunisa, N. (2017). The Implementation of Value Clarification Technique (VCT) Learning Model to Improve Social Care Character in Social Science Learning. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 2, 1-5.
- Lakstian, V. (2016). The contributions of literacy skills to national development. *Leksema*, 1, 11-118.
- Lestari, M. (2016). implementation of citizenship character formation by the study of civic education on senior high school in the district of Bantul. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*. 1-15.
- Nugraha, Y. & Sapriya. (2015), The influence civics teacher and learning atmosphere towards discipline development of students in junior high school karawang, *Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 19: 87-99.
- Nuryanta & Suyato. (2016). The impact of the using of value clarification technique (vct) towards civic disposition building in civics subject for grade x of senior high school 1 piyungan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*. 1.13.
- Perangin-angin, R.B.B., (2017). Pengembangan Pembelajaran PPKn Berbasis Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kompetensi Civic Skill Mahasiswa Jurusan PPKn UNIMED, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2): 151-160
- Ramadani, D. (2017). The Effectiveness of Bung Tomo's Biography Module Based on VCT in Historical Learning to Improve the Value of Patriotism. *American International Journal of Social Science*, 6, 60-65.
- Ribble, M. & Bailey, G. (2007). Digital citizenships in scholls. Washington: ISTE.
- Silvia, R.M. Suntoro, I. & Nurmalisa, Y. (2013). Pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap aplikasi nilai karakter siswa di SMAN 1 terbanggi besar kabupaten lampung tengah tahun pelajaran 2012/2013. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1, 1-12.
- Tilaar, H.A.R. (1998). Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam persektif abad 21. Magelang: Tera Indonesia.
- Suharyanto, A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 192-203
- _____, (2017), Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dalam *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017* Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 530-534.
- Suparlan, P. (2005). Sukubangsa dan hubungan antar sukubangsa. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Winaputra, S.U. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem pendidikan nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1, 15-36.
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.